

STRATEGI PENGUATAN PENDIDIKAN NON-FORMAL DI KOTA SAMARINDA

(*STRENGTHENING NON-FORMAL EDUCATION STRATEGIES IN SAMARINDA CITY*)

Mayahayati Kusumaningrum¹, Fani Heru Wismono², Hambali Isran³, Ratnaningsih⁴

^{1,2} Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN
JL. H.M. Ardians 2 Samarinda
Email: may.kaltim@gmail.com

^{3,4} Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Samarinda
JL. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda

Diterima: 7 Oktober 2019; Direvisi: 6 November 2019; Disetujui: 11 November 2019

ABSTRACT

The increasing need for quality human resources, makes the role of Non-formal Education (PNF) feasible to be strengthened. PNF not only supports the compulsory education completion program, but also eradicates illiteracy, extends early childhood education, and improves skills for the welfare of the students. The current condition of job seekers in Samarinda mostly are high school graduates, and most of the workers are absorbed in the wholesale, retail, restaurant and hotel sectors as well as the transportation, warehousing, and communication sectors. The research was conducted in order to search for a strategic way and also come up with an alternative with which and by whom non formal education to fit the needs the business world in the city of samarinda. This study used qualitative research methods. Data collection uses library and field research. Data collection in the field was carried out by in-depth interviews and FGDs to related agencies and institutions. From the aspect of policy, the current condition of non-formal education has been carried out based on the mandate of the legislation, however the non-formal education sector has not been a priority for local governments to be strengthened. At present, there are not too many variations of PNF in Samarinda compared to those in other regions. Moreover, knowledge and skills based on online systems (e-commerce) have not been explored properly by local governments.

Keywords: *Non-formal education, labor, policy*

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas, menyebabkan peranan Pendidikan Nonformal (PNF) menjadi pertimbangan. PNF tidak hanya mendukung program penuntasan wajib belajar, akan tetapi juga memberantas buta aksara, perluasan pendidikan anak usia dini, serta peningkatan keterampilan dan kecakapan untuk selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga belajarnya. Kondisi SDM pencari kerja di Samarinda saat ini merupakan lulusan SMA, dan sebagian besar pekerja terserap di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel serta sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mencari langkah strategis dan juga alternatif yang mendorong pendidikan nonformal agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Kota Samarinda Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penggalan data di lapangan dilakukan secara *indepth interview* serta FGD ke dinas dan lembaga terkait. Dari penggalan data lapangan dan studi kepustakaan terlihat bahwa kondisi pendidikan nonformal saat ini dilihat dari aspek kebijakan sudah dilakukan urusannya berdasarkan amanah peraturan perundangan yang memayunginya, namun sektor pendidikan nonformal belum menjadi prioritas daerah untuk digarap. Saat ini pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha di

Kota Samarinda belum terlalu banyak jenisnya dibanding dengan yang ada di daerah lain. Pengetahuan dan keterampilan berbasis online system (*e-commerce*) belum digarap dengan baik oleh pemerintah daerah.

Kata kunci: pendidikan nonformal, tenaga kerja, kebijakan

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya teknologi informasi pada era industri 4.0 mendorong pemerintah semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM. Di berbagai media, Presiden juga menyampaikan pentingnya pendidikan yang bagus, baik formal dan nonformal untuk menguatkan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi kompetisi dengan negara lain yang lebih maju. Keberadaan pendidikan non formal masih sangat jarang dijadikan wacana publik, karena anggapan lebih pentingnya pendidikan formal untuk menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia. Padahal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas, maka peranan pendidikan nonformal menjadi sangat kuat (liputan6.com, 2017). Sejatinya peranan pendidikan nonformal tidak hanya mendukung program penuntasan wajib belajar, akan tetapi juga memberantas buta aksara, perluasan pendidikan anak usia dini, serta peningkatan keterampilan dan kecakapan untuk selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup warga belajarnya. Jika kita melihat pada peraturan perundangan yang ada, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal dibutuhkan guna mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Untuk bisa menyelenggarakan pendidikan nonformal, maka dibentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Meskipun berbeda dengan pendidikan formal, namun hasil pembelajaran dari pendidikan nonformal tetap dapat dihargai dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Samarinda berjumlah 843.444 jiwa dan meningkat hampir 2 persen di tahun 2018 mencapai 858.080 jiwa (BPS, 2019). Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok berusia 15 tahun keatas yang merupakan kelompok penduduk produktif dan potensial secara ekonomi. Pada tahun 2018 kelompok usia produktif di Samarinda tercatat sebanyak 641.194 jiwa. Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja sebanyak 393.174 jiwa, yang terdiri dari 368.943 jiwa atau 93,83% bekerja, dan sisanya, yakni 6.07 % adalah pengangguran. Sebagian besar pekerja terserap di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel serta sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi (BPS Kota Samarinda, 2019).

Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan pengelolaan sumberdaya manusia, maka Kota Samarinda masih belum serius menangani kebijakan SDMnya. Hal ini bisa dilihat dari temuan awal dari informasi beberapa OPD di Kota Samarinda yang menyatakan belum adanya integrasi kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan SDM, khususnya dari sisi Pendidikan Non-formal. Selain itu didapat informasi awal bahwa peningkatan kualitas di bidang Pendidikan Formal lebih dominan daripada kebijakan bidang Pendidikan Non-formal. Padahal sektor Pendidikan Non-formal memiliki nilai strategis yang tidak kalah dibanding dengan Pendidikan Formal. Dunia usaha saat ini telah memperketat persyaratan penerimaan pegawainya, dengan pengetahuan serta ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Namun Pendidikan Formal sering tidak mampu menjangkau

kebutuhan yang dipersyaratkan. Selain itu bukan hanya sektor industri saja yang berubah, di sektor wirausaha pun juga membutuhkan model bisnis yang berbeda. Sehingga alternatif penting melalui penguatan Pendidikan Non-Formal menjadi strategi penting yang harus diambil oleh pemerintah daerah. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM inilah yang masih menjadi permasalahan di Kota Samarinda berdasarkan informasi awal dari OPD yang terkait dengan pendidikan dan juga ketenagakerjaan.

Untuk lebih mengoptimalkan seluruh sumberdaya manusia yang ada seperti yang telah difokuskan oleh pemerintah hingga saat ini, maka menjadi penting untuk mendorong pendidikan nonformal lebih berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap diserap oleh pasar kerja, sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini dan akan datang. Penelitian ini dilakukan untuk mencari langkah strategis dan juga alternatif yang mendorong pendidikan nonformal agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Kota Samarinda

TINJAUAN PUSTAKA

Pada pasal 26 UU No. 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya disebutkan bahwa fungsi dari pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik, dengan penekanan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Untuk lingkup pendidikan nonformal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Lebih lanjut peraturan perundangan menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal yang dapat dibentuk antara lain terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan lain yang sejenis. Kelebihan lain yang didapat dari pendidikan nonformal adalah hasil pendidikannya dapat disetarakan dengan hasil pendidikan formal, namun setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Pada pasal 52 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan bisa oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Untuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat disebutkan pada pasal 55 undang-undang yang sama bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat para pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pada tahap evaluasi, maka pendidikan nonformal juga sama dengan pendidikan formal, Oleh karenanya akreditasi terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan perlu dilakukan, baik pada jalur formal dan nonformal yang diatur pada pasal 60 UU No. 20 Tahun 2003. Sehingga pada prinsipnya penyelenggaraan pada satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penjelasan lebih rinci mengenai pendidikan nonformal, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, mulai pasal 100 hingga pasal 115. Secara tegas dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di jalur nonformal meliputi dua hal yaitu: penyelenggaraan satuan pendidikan, dan yang kedua program pendidikan nonformal. Kemudian dirinci untuk satuan pendidikan nonformal meliputi satuan pendidikan: 1) lembaga kursus dan lembaga pelatihan; 2) kelompok belajar; 3) pusat kegiatan belajar masyarakat; 4) majelis taklim, dan; 5) pendidikan anak usia dini jalur nonformal. Pada sisi lain, penyelenggaraan program pendidikan nonformal meliputi: 1) pendidikan kecakapan

hidup; 2) pendidikan anak usia dini; 3) pendidikan kepemudaan; 4) pendidikan pemberdayaan perempuan; 5) pendidikan keaksaraan; 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan; 7) pendidikan kesetaraan. Hasil kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal, tentu saja dengan berbagai syarat dan catatan tertentu. Sedangkan semangat penyelenggaraan pendidikan nonformal berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Adanya kemudahan yang diberikan teknologi informasi saat ini, penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal (PNF) dapat mengajukan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Lingkup perizinan berusaha sektor pendidikan meliputi: a) izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; b) izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; c) izin operasional Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK); d) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, dan; d) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

Sebuah laporan yang ditulis oleh Coombs dan Ahmed (1974) untuk World Bank, yang berjudul “*Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*”. menawarkan suatu konsep baru bagaimana melalui penguatan terhadap pendidikan nonformal kemiskinan di desa bisa direduksi secara signifikan. Yang dimaksud dengan pendidikan nonformal disini adalah sebuah aktivitas pendidikan terorganisir dan sistematis yang dilakukan di luar kerangka sistem pendidikan formal, untuk menyediakan beberapa tipe pembelajaran yang bisa dipilih oleh sub grup tertentu dalam masyarakat, baik yang sudah dewasa maupun anak-anak.

Miradj dan Sumarno (2014) menyatakan bahwa dalam konteks negara berkembang, negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mendorong kemajuan pendidikan nonformal untuk membantu masyarakat yang hidup serba kekurangan. Sasaran pendidikan nonformal seharusnya semakin luas. Bukan hanya sekedar berhubungan dengan masyarakat miskin dan bodoh saja, tetapi pendidikan nonformal harus mengikuti perkembangan terkini ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat.

Tulisan Suryono dan Tohani (2016) yang berjudul “Inovasi Pendidikan Nonformal”, mengenalkan perkembangan konsep pendidikan nonformal. Konsep yang berkembang di Indonesia sebelum istilah pendidikan nonformal dikenal, lebih dahulu dikenal adalah pendidikan masyarakat, pendidikan sosial, pendidikan luar sekolah, dan baru kemudian orang mengenal istilah pendidikan nonformal.

Hidayat et.al. (2017) memberikan gambaran mengenai perbedaan antara pendidikan informal dan nonformal sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
Perbedaan Antara Pendidikan Informal dan Pendidikan Nonformal

No.	Pendidikan Informal	Pendidikan Nonformal
1	Tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah	Bisa diselenggarakan dalam gedung sekolah
2	Medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud menyelenggarakan pendidikan	Medan pendidikan yang bersangkutan memang diadakan bagi kepentingan penyelenggaraan pendidikan
3	Pendidikan tidak diprogram secara tertentu	Pendidikan diprogram secara tertentu
4	Tidak ada waktu belajar tertentu	Ada waktu belajar tertentu
5	Metode mengajarnya tidak formal	Metode mengajarnya lebih formal
6	Tidak ada evaluasi yang sistematis	Ada evaluasi yang sistematis
7	Umumnya tidak diselenggarakan oleh pemerintah	Diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta

Sumber: Hidayat et.al. (2017)

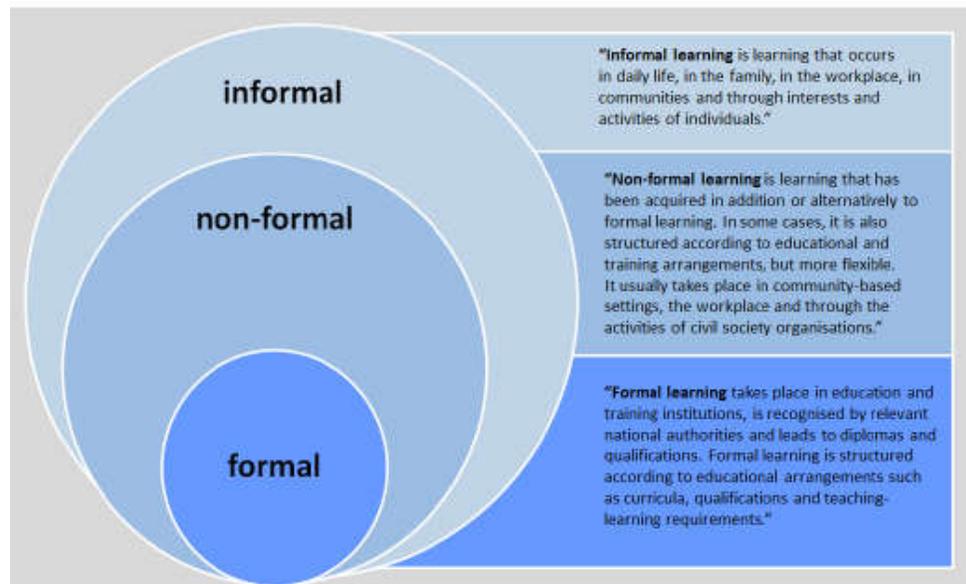
Perbedaan antara pendidikan nonformal dan pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 2 menurut Jaoesaef dalam Hidayat et.al. (2017).

Tabel 2
 Perbedaan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Nonformal	Pendidikan Formal
1	Pada umumnya tidak dibagi atas jenjang	Selalu dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis
2	Waktu penyampaianya lebih pendek	Waktu penyampaian diprogram lebih panjang atau lebih lama
3	Usia siswa disuatu jenis pendidikan nonformal tidak perlu sama	Usia siswa disesuaikan, jenjang relatif homogen, khususnya pada jenjang-jenjang permulaan
4	Para siswa didik umumnya berorientasi studi jangka pendek, praktis, agar segera dapat menerapkan hasil pendidikannya dalam praktik kerja (berlaku terutama pada masyarakat yang sedang berkembang)	Para siswa kurang berorientasi pada materi program yang bersifat praktis, dan kurang berorientasi kearah kerja
5	Materi pada pelajarannya pada umumnya lebih banyak bersifat praktis dan khusus	Materi pelajarannya lebih banyak bersifat akademis dan umum
6	Merupakan respon dari sebuah kebutuhan khusus yang mendesak	Merupakan respon dari kebutuhan umum dan relatif jangka panjang
7	<i>Credentials</i> (Ijazah dan sebagainya) umumnya kurang memegang peranan penting terutama bagi penerimaan siswa	<i>Credentials</i> memegang peranan penting

Sumber : Jaoesaef dalam Hidayat et.al. (2017)

Konsep pendidikan nonformal dalam kerangka sistem pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.
 Sistem Pendidikan Definisi UNESCO
 Sumber: UNESCO (dalam Keuchel, 2014)

Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam kerangka pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing, Widodo (2018) Presiden RI saat ini pernah menyampaikan bahwa membangun manusia Indonesia adalah investasi dalam menghadapi masa depan, dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju.

Sehingga penyiapan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dini menjadi kunci keberhasilan pembangunan SDM. Setidaknya terdapat lima aspek pembangunan manusia yang menjadi fokus kebijakan pemerintah, antara lain: 1) kemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa; 2) pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing; 3) peningkatan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan; 4) penguatan Indonesia sentris, dan; 5) peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif. Sehingga tepat bila masalah ekonomi tidak bisa dilepaskan dari masalah pendidikan dan begitu juga sebaliknya (Widiansyah, 2017). Alhumami (dalam Dariah, 2004) menyatakan bahwa pendidikan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Asumsinya bahwa pendidikan akan melahirkan tenaga kerja produktif, karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Pengembangan dunia usaha yang berbasis pada koperasi dan UMKM menjadi salah satu wujud ekonomi kerakyatan. Perubahan yang terjadi saat ini mendorong masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetap juga perlu didorong untuk lebih mengambil peran dalam perubahan. Sehingga persiapan diberbagai bidang perlu dilakukan salah satunya penguatan dalam pendidikan yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti halnya dalam pendidikan nonformal. Selain itu perlu dilakukan upaya pengoptimalan peran serta lembaga ekonomi masyarakat dalam hal ini koperasi dan UMKM agar nantinya pelaku usaha juga bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian, baik di pusat dan daerah.

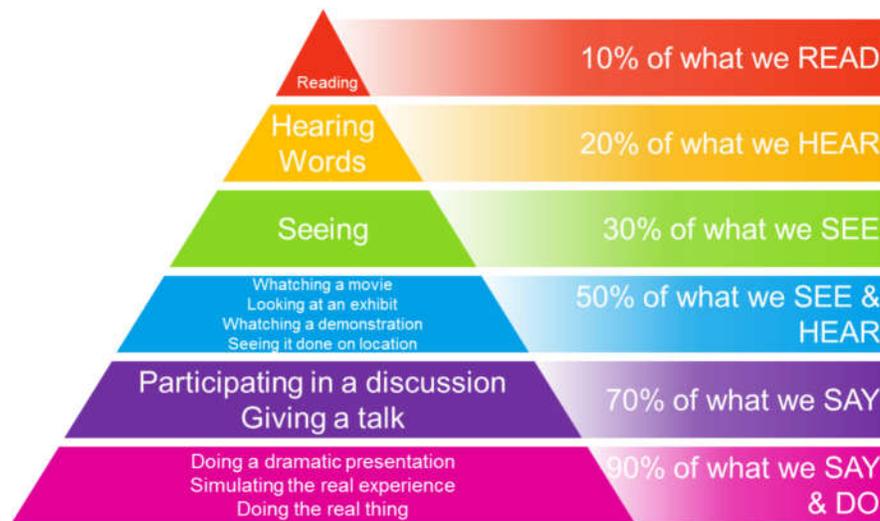
Mengambil definisi dari OECD (dalam Krezios dan Ambrozy, 2010), bahwa di negara-negara yang tergabung dalam OECD, yang dimaksud sebagai pendidikan nonformal adalah setiap aktivitas pendidikan yang terorganisir dan berkelanjutan yang tidak terhubung langsung dengan definisi pendidikan formal. Meskipun demikian, pendidikan nonformal bisa saja mengambil tempat di dalam maupun di luar institusi pendidikan dan dilakukan oleh semua orang di semua usia. Biasanya pendidikan nonformal memiliki program tentang keaksaraan bagi orang dewasa, dasar pendidikan bagi orang yang putus sekolah, keterampilan hidup, keterampilan kerja, dan budaya secara umum. Pendidikan nonformal tidak mengikuti pola pendidikan pada umumnya, termasuk memiliki durasi waktu yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Pada sisi lain di negara China, pendidikan nonformal juga mencakup pemberdayaan masyarakat desa (Zhang, 2014). Menurutnya, masyarakat desa di China tidak homogen, sehingga pendidikan juga harus relevan merespon berbagai keanekaragaman situasi di desa. Kebijakan pusat terbukti tidak efektif mendorong peningkatan program pendidikan dimana masyarakat desa begitu bervariasi. Sehingga masyarakat desa secara bertahap meningkatkan sendiri kemampuannya dalam menjalankan program pendidikan, dan diperbolehkan memainkan peran yang lebih besar untuk membuat keputusan sendiri untuk kebaikannya di masa depan. Banyak temuan dari model pendidikan di China, dimana pendidikan berperan penting dalam pembangunan desa. Selain menyediakan pendidikan 9 tahun yang wajib, berbagai variasi dari pendidikan nonformal diluncurkan untuk memfasilitasi masyarakat desa di berbagai aspek. Untuk mengoptimalkan kesuksesan pelaksanaan program pendidikan nonformal, terdapat tiga elemen penting yakni: perencanaan yang baik dalam konteks hubungan dengan desa, dukungan yang terus menerus dari pemerintah, dan ketiga adalah partisipasi aktif dari masyarakatnya sendiri. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan yang menghadirkan ketidakpastian akan diubah dengan pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi perubahan.

India juga merupakan salah satu negara yang mendorong penguatan sistem pendidikan nonformal. Pemerintah India menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan pelengkap pendidikan formal, yang diperlukan karena memang ada kebutuhan, fleksibel, fungsional, dan

efektif dalam pembiayaan. Meskipun pemerintah India memiliki peran penting, namun peran lembaga masyarakat berbasis volutir juga patut diperhitungkan.

Persepsi pada umumnya terhadap pendidikan nonformal biasanya dianggap hanya untuk kalangan miskin dan lemah dari masyarakat, atau kelompok masyarakat yang putus sekolah. Beberapa target grup yang tidak bisa masuk kedalam jalur pendidikan formal dikarenakan beberapa kondisi, seperti: miskin, disabilitas, buta aksara, pengangguran, anak putus sekolah, perempuan, dan juga mayoritas dari kasta paria (*dalits*). Kasta paria adalah kasta terendah dalam sistem kastanisasi di India. Mereka sangat rentan dan jumlahnya sangat banyak, sekitar 138 juta orang. Merekalah target utama pendidikan nonformal di India (Pandya dan Maniar, 2014). Lebih lanjut dijelaskan oleh Dale (dalam Pandya dan Maniar, 2014), bahwa model pembelajaran yang efektif untuk pendidikan nonformal didapat dari beberapa tahapan yang kemudian dapat dilihat dalam diagram piramida pada Gambar 2.



Gambar 2.
Piramida Pengalaman Belajar Bagi Peserta Didik Pendidikan Nonformal
Sumber: Edgar Dale (dalam Pandya dan Maniar, 2014)

Selain itu, kebijakan pendidikan nonformal di India dilakukan secara serius untuk menjawab besarnya permasalahan SDM disana, dengan terus membuat kebijakan riset pendidikan nonformal secara berkelanjutan. Terdapat tiga aspek dalam melakukan riset pendidikan nonformal di India, yaitu: 1) untuk menemukan cara baru yang lebih baik yang juga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang tidak diterima pada pendidikan formal; 2) untuk mengumpulkan lebih banyak konten pembelajaran baru yang masuk kedalam lingkup pendidikan nonformal; 3) untuk secara kritis terus mengevaluasi pendidikan nonformal itu sendiri, mempelajari peluang dan tantangan, kekuatan dan kelemahan saat ini agar pendidikan nonformal semakin meningkat kualitasnya.

Permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan tingginya buta aksara menyebabkan Pemerintah Kerajaan Kamboja melakukan penguatan di sisi pendidikan nonformal secara khusus (Kingdom of Cambodia, n.d). Tujuan dari penguatan yang dilakukan adalah membuka semua peluang agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pendidikan sepanjang hayat. Selain itu kebijakan tersebut diperuntukkan untuk mendorong melek aksara dan melanjutkan pendidikan meskipun dari jalur nonformal agar memudahkan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan.

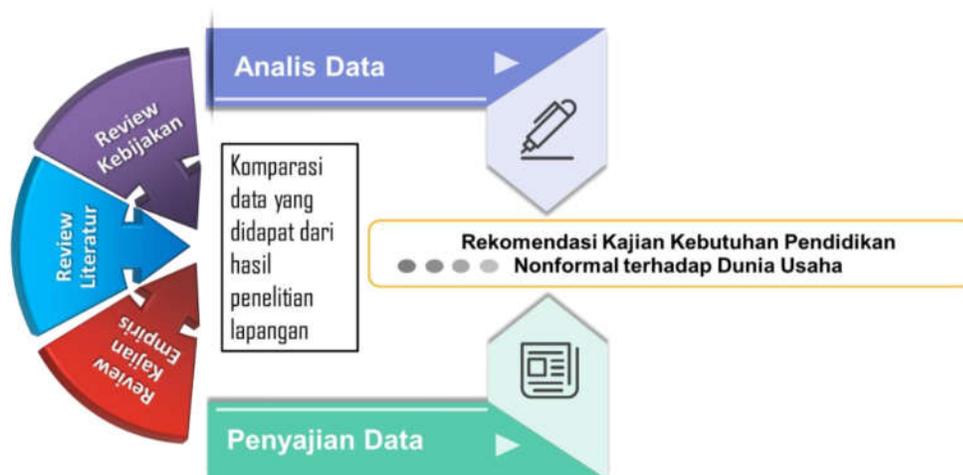
METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan kondisi terkini dari pendidikan nonformal yang ada di Kota Samarinda, serta berbagai jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha di Kota Samarinda.

Metode pengumpulan data yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan, bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi cetak dan online, dan hasil penelitian.
2. Metode Penelitian Lapangan. Untuk melengkapi data studi pustaka tersebut, juga dilakukan pengumpulan data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang melalui informasi dan pendapat-pendapat dari para *key informant* yang di tentukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data lapangan ini dilakukan dengan metode *in-depth interview* serta FGD yang dilakukan pada periode bulan April hingga Juni 2019 kepada para responden terpilih, yaitu:
 - Dinas Pendidikan Kota Samarinda
 - Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
 - Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda
 - Dinas Perindustrian Kota Samarinda
 - LKP yang ada di Kota Samarinda
 - *Stakeholders* lainnya yang relevan dengan kajian ini

Teknik reduksi data dilakukan dengan pengumpulan data dari review kajian empirirs, review literature dan review kebijakan, kemudian komparasi data lapangan, lalu mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola untuk selanjutnya disajikan menjadi hasil penelitian dan rekomendasi kajian.



Gambar 3
Kerangka Pikir
Sumber : Hasil Analisis (2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil kajian terkait dengan Pendidikan Non-formal yang dimuat di jurnal antara lain oleh Miradj dan Sumarno (2014), tentang “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat”. Dari hasil kajian tersebut menyebutkan masih kurang kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menguatkan peran Pendidikan nonformal, yang terlihat dari

kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pemerintah daerah sendiri, dan juga dengan pihak swasta, dan masyarakat. Indikator lainnya adalah dari kurangnya program dan kegiatan yang menunjukkan perbaikan kualitas SDM melalui Pendidikan, khususnya Pendidikan Non-formal. Selain itu hasil tulisan dari Prasetyo (2009) yang berjudul “Membangun Karakter Wirausaha Melalui Pendidikan Berbasis Nilai Dalam Program Pendidikan Non-Formal”, menyatakan bahwa pemerintah perlu menguatkan peran Pendidikan Non-Formal untuk mengurangi angka pengangguran. Nilai strategis yang dimiliki adalah Pendidikan Non-Formal adalah karakternya yang mampu memberikan peningkatan kecakapan hidup bahkan jika nantinya peserta didik harus membuka usaha sendiri melalui jalur wirausaha. Sehingga pemerintah perlu menguatkan kebijakan bidang Pendidikan Non-Formal melalui program dan kegiatan yang di sinergikan dengan pihak swasta dan juga masyarakat selaku mitra kerja pemerintah. Selain itu beberapa kebijakan sebagai pembanding dari tulisan ini yang telah dilakukan oleh beberapa negara lain telah disampaikan pada bagian tinjauan pustaka.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan investasi kemanusiaan (*human investment*) bagi pertumbuhan dan kemajuan bangsa dan menjadi kebutuhan mendasar bagi penduduk sebagai sarana mutlak untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, sehingga menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Di tahun 2018, dari data BPS (2019), jumlah pencari kerja terbanyak di Kota Samarinda merupakan lulusan SMA dan yang sederajat dan mencapai 60,26% dari jumlah pencari kerja, jumlah kedua terbanyak merupakan lulusan S1 sebanyak 23.26%, penduduk yang bukan angkatan kerja mencapai 230.341 orang atau sekitar 36,84% dari total penduduk usia 15 tahun keatas. Di tahun 2018, jumlah angkatan kerja menurun menjadi 393.174 orang dan pengangguran berjumlah 24.231 orang atau TPT menurun menjadi 6.16%.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan ketrampilan masyarakat khususnya para pencari kerja/tenaga kerja, pemerintah telah membekali tenaga kerja melalui pelatihan, baik yang dilakukan di BLKI maupun di luar BLKI. Dari data BPS (2019) ini, pembekalan cukup banyak diberikan di tahun 2015 dan 2016, namun semakin menurun di tahun 2018, khususnya pelatihan di luar BLKI. Di tahun 2015 peran pelatihan di luar BLKI justru lebih besar, namun menurun di tahun 2017.

Tabel 3.
 Perkembangan Tenaga Kerja Yang dilatih BLKI dan di Luar BLKI
 di Kota Samarinda 2013-2018

Tahun	BLKI	Lainnya	Jumlah
2013	704	3.983	4.687
2014	1.089	2.469	3.558
2015	624	3.443	4.067
2016	3.200	1.059	4.259
2017	1.044	475	1.489
2018	912	260	1.172

Sumber : BPS Kota Samarinda (2019)

Pada tahun 2015 dan 2016 cukup banyak pelatihan yang dilakukan di Samarinda mencapai 4.259 pelatihan, namun menurun di tahun 2017 menjadi 1.489 pelatihan. Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 1.529 pelatihan, dimana pelatihan bahasa Inggris yang cukup banyak peminat (dilakukan 362 pelatihan, di luar Lain-lain). Pelatihan lainnya yang cukup banyak peminat adalah computer dan mekanik. Untuk pelatihan bahasa Inggris dan computer sepanjang tahun 2014 hingga 2018 mengalami peningkatan, namun untuk pelatihan/ketrampilan mekanik justru menurun. Pelatihan kecantikan juga mengalami penurunan di tahun 2018. Sedangkan pelatihan mengetik, bimbel, serta bangunan beton tidak ada data sepanjang 2014 hingga 2018.

Tabel 4.
Perkembangan Latihan dan Keterampilan Kerja Yang dilaksanakan oleh Lembaga Swasta Kota Samarinda 2014-2018

JENIS LATIHAN	2014	2015	2016	2017	2018
Bahasa Inggris	90	235	315	115	362
Akuntansi	48	-	10	10	-
Menjahit	286	10	25	20	48
Komputer	146	194	176	195	200
Elektronik	24	-	20	20	20
Supir	194	95	84	50	50
Kecantikan	487	155	215	155	20
Mekanik	248	661	571	245	96
Lain-lain	963	2.682	2.843	679	733
Jumlah	2.486	4.032	4.259	1.489	1.529

Sumber : BPS Kota Samarinda (2019)

Implementasi Kebijakan

Amanat untuk melaksanakan pelayanan terhadap urusan pendidikan nonformal secara spesifik diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda No 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kewenangannya diberikan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat dan Keluarga. Secara hirarkis penjabaran tugas Bidang kemudian dilakukan di level teknis melalui seksi dibawahnya, yaitu Seksi Pendidikan Masyarakat, yang tugas-tugasnya diatur pada pasal 13 Peraturan Walikota Samarinda No. 23 Tahun 2016. Sedangkan sebagian tugas berkaitan dengan pendidikan nonformal juga dilakukan oleh Seksi Pendidikan Keluarga sebagaimana diatur pada pasal 14 peraturan yang sama.

Secara spesifik tugas pengelolaan urusan pendidikan nonformal berhenti di Dinas Pendidikan, dan tidak nampak ada penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan nonformal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Meskipun demikian jika ditelusuri secara seksama, maka baru akan nampak atau berpengaruh di tingkat dampak kebijakan secara akumulatif. Misalnya saja, mengenai perhitungan kontribusi peserta didik dari jalur nonformal terhadap pembangunan daerah di Kota Samarinda. Kebijakan dengan level penghitungan dampak kebijakan yang bisa dilakukan dengan melakukan koordinasi antar OPD belum nampak dilakukan, sehingga meskipun urusan telah ada dan telah dilakukan sesuai dengan aturan, namun terkesan masih parsial, yang selanjutnya daerah belum bisa secara riil melihat seberapa signifikan suatu urusan berkontribusi kepada pembangunan daerah.

Menurut data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda tahun 2018, lembaga kursus dan pelatihan di Kota Samarinda setidaknya berjumlah 83 lembaga yang masih aktif yang tersebar di 10 kecamatan di Samarinda. Lembaga kursus dan pelatihan paling banyak berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 30 lembaga, Kecamatan Sungai Pinang memiliki 14 lembaga, Kecamatan Samarinda Ilir 13 lembaga, Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Utara masing-masing terdapat 8 lembaga. Sedangkan untuk satuan pendidikan nonformal berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kota Samarinda berjumlah 25 lembaga. Terbanyak ada di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang yaitu masing-masing ada 5 lembaga, disusul Kecamatan Loa Janan Ilir dengan 4 lembaga. Variasi kursus dan pelatihan yang ada di Kota Samarinda antara lain: kursus salon/ kecantikan, pelatihan bahasa, musik, menyetir, komputer, bimbingan belajar, robotik, otomotif, serta kursus menjahit.

Selain itu Kota Samarinda juga memiliki satuan pendidikan nonformal berupa Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Setidaknya ada 30 TBM yang

tersebar di 9 Kecamatan dan satu SKB yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan juga Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Pada tahun 2018 setidaknya ada 11 lembaga penerima program PKW dan 10 lembaga penerima PKK. Beberapa satuan pendidikan yang menerima PKW dan PKK terdiri dari: perawatan lansia, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin, komputer, desain grafis, menjahit, tata boga (*pastry & bakery*), tata busana, pengolahan hasil perikanan (lobster air tawar), pengemasan aneka kue dan roti, serta tata kecantikan kulit.

Meskipun menurut Dinas Pendidikan, anggaran yang digelontorkan untuk pendidikan nonformal masih lebih sedikit dibanding pendidikan formal, namun setiap tahun mereka menargetkan setidaknya 220 orang yang diberikan pelatihan atau kursus, dibentuk pengetahuan, ketrampilan, dan perilakunya sehingga harapannya akan menjadi pelaku usaha yang mandiri. Melalui kebijakan di Dinas Pendidikan telah didorong untuk kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menguatkan kebijakan nonformal, namun memang belum dilakukan penandatanganan MoU. Pengelolaan data pelatihan secara umum sudah dilakukan, namun belum ada kebijakan lanjutan dalam penggunaan data yang ada. Sering juga data lupa di update oleh lembaga.

Selain dilaksanakan melalui program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Samarinda, terdapat jenis pelatihan lainnya yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di beberapa daerah. Di tahun 2017, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda bekerjasama dengan BBPLK Bekasi menyelenggarakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diikuti oleh 16 peserta pelatihan. Kemudian di tahun berikutnya (tahun 2018), masih dengan BBPLK Bekasi, ada kerjasama pelatihan *Network Profesional* diikuti 8 orang peserta didik. Selain itu juga pelatihan *Computer Technician*, yang diikuti oleh 8 orang peserta didik. Pada tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja juga menjalin kerjasama dengan BBPLK Semarang mengadakan pelatihan Kejuruan Marketing dengan 16 peserta didik. Selanjutnya di tahun 2019 ini, kerjasama dengan BBPLK Bandung untuk mengadakan pelatihan Kejuruan Otomotif yang diikuti 5 orang siswa dari Samarinda, pelatihan Operator Mesin Bubut ada 8 orang siswa. Di tahun ini juga dilakukan pelatihan Pembuatan Kode File 3D dengan mengirimkan 8 peserta, serta kerjasama dengan BBPLK Serang-Banten mengadakan pelatihan Teknik Las GMAW 3D dengan 8 peserta yang dikirim, pelatihan Teknik Listrik Pemasangan Instalasi Kontrol Industri Berbasis PLC yang diikuti oleh 7 peserta, kerjasama dengan BBPLK Semarang dalam pelatihan Desainer Busana Kreasi dengan mengirim 7 orang peserta. Kemudian pelatihan *Customer Service* dengan jumlah peserta didik sebanyak 7 peserta. Kerjasama lain dengan BBPLK Bekasi dalam pelatihan Jaringan Komputer yang diikuti 4 orang peserta, pelatihan Perakitan Komputer sebanyak 4 orang, serta pelatihan *Mobile Programming* sebanyak 4 peserta, dan terakhir di tahun 2019 adalah pelatihan *Food and Beverage Service* dengan mengirimkan 7 orang peserta didik. Kursus dan pelatihan yang juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, dengan melakukan pelatihan pembuatan kue, menjahit, dan juga sablon.

Pendidikan nonformal saat ini memang belum menjadi prioritas oleh Pemerintah Kota Samarinda. Kegiatan berjalan seperti biasanya dan belum ada terobosan dengan pemanfaatan database yang dimiliki di berbagai Dinas/Badan terkait. Ada beberapa kegiatan dalam pendidikan nonformal seperti Rumah Pintar yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat, namun memang tidak sama jumlahnya setiap tahunnya.

Ada bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui pemantapan kepada peserta didik yang sebelumnya telah dilatih. Namun memang juga harus diakui, kerjasama terkait dengan pemberdayaan hasil pendidikan nonformal dengan Dinas Pendidikan masih belum berjalan optimal. Selain itu ada permasalahan klasik koordinasi,

misalnya dengan Dinas Perdagangan dalam pemanfaatan alat. Peserta pelatihan kadang diberi peralatan produksi oleh Dinas Perindag namun dengan skala yang besar, padahal usaha yang dijalani adalah usaha kecil. Sehingga alat yang diberikan menjadi mubazir tidak terpakai.

Untuk target peserta didik pelatihan ataupun kursus yang dibiayai pemerintah daerah, dilakukan dengan bersurat ke Kecamatan untuk melakukan seleksi di tingkat Kelurahan. Dari Kelurahan akan memberikan nama-nama orang yang akan mengikuti pelatihan yang diambil dari beberapa RT yang ada di Kelurahan. Biasanya setiap pelatihan setidaknya terdiri dari 4 kelompok, dimana setiap kelompoknya berisi 10 orang. Dalam satu tahun bisa dilakukan tiga gelombang, sehingga dalam satu tahun paling tidak ada 120 orang yang mendapatkan pelatihan. Belum lagi dari OPD lainnya. Kurang lebih setiap tahunnya ada sekitar 500an orang yang dilatih melalui pembiayaan pemerintah daerah. Belum lagi mereka yang mengikuti kursus ataupun pelatihan dengan pihak swasta dengan biaya sendiri. Namun demikian kembali pada persoalan data yang tidak tercatat dengan baik mengenai potensi masyarakat yang kemudian terjun ke dunia kerja ataupun membuka usaha sendiri.

Kebijakan yang harus dibangun agar sinergis antara lain, Dinas Pendidikan melatih masyarakat lewat pendidikan nonformal agar menjadi terampil, kemudian output tenaga terampilnya akan disalurkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Pilihan untuk masuk di industri maka akan disalurkan melalui kemudahan kebijakan di Dinas Perindustrian, jika melalui wirausaha atau koperasi maka Dinas Koperasi dan UKM yang berperan. Kemudian ada database yang terintegrasi untuk memantau pergerakan para alumni dan berbagai usaha baru yang digelutinya. Sehingga potensi perputaran omzetnya bisa dihitung sebagai bahan pengambilan kebijakan daerah selanjutnya. Dari sektor UKM telah mengupayakan kebijakan pengembangan potensi UKM dan meminta produk-produk lokal dapat tempat di display bandara baru. Selain itu sedang diupayakan adanya satu tempat tersentral yang memudahkan masyarakat mendapat produk UKM lokal.

Model Alternatif Pengembangan Pendidikan Nonformal di Samarinda

Kebijakan yang ada saat ini secara umum telah mencakup urusan pendidikan nonformal. Terbukti dengan dilaksanakannya amanat peraturan perundangan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta peraturan lain dibawahnya. Pada level Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Samarinda telah memberikan payung hukum pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan nonformal melalui Peraturan Walikota Samarinda No. 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Masyarakat Kota Samarinda yang saat ini tidak terjangkau oleh pendidikan formal, dapat mendapatkan akses pendidikan nonformal yang terdiri dari berbagai macam varian, seperti: kursus dan pelatihan, PKBM, TBM, SKB, serta model lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan. Selain itu model kursus yang merupakan bagian dari model pendidikan nonformal juga sudah mengikuti tuntutan zaman saat ini. Ini terbukti dari adanya kursus berbasis IT, *Customer Service*, *Food and Beverage*, *Mobile Programming*, dll.

Dari sisi kebijakan variasi pendidikan nonformal yang sudah dilakukan cukup menggembirakan, namun dari segi penambahan variasi, peningkatan peserta didik, penguatan anggaran, serta pengembangan dan pemanfaatan *database*-nya belum optimal dan belum menjadi prioritas daerah. Hal ini dengan masih dilakukan kegiatan secara parsial di masing-masing OPD yang berwenang, dan belum optimal sinergi yang dibangun antar OPD. Pengelolaan lanjutan terhadap data yang dimiliki juga terlihat belum maksimal, sehingga pengambilan kebijakan alternatif sebagai percepatan pembangunan daerah di bidang pengelolaan SDM belum bisa dilakukan dengan baik. Pimpinan daerah belum diberikan masukan alternatif terkait pengelolaan SDM yang ada dan berpotensi memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah. Kebijakan yang telah berjalan namun masih belum optimal

ditengarai terjadi akibat masih belum tegasnya daerah dalam mengawal pencapaian visi dan misi daerah. Sektor unggulan daerah perlu dikelola oleh SDM yang unggul yang didapat dari hasil pendidikan.



Gambar 4.
Lima Aspek Pembangunan Manusia Indonesia
Sumber: Widodo (2018)

Agar seluruh aspek pembangunan manusia dapat diukur keberhasilannya, maka perlu dibuat indikator-indikator ukuran yang memudahkan pemerintah dan pemerintah daerah memantau dan menjadikannya dasar pengambilan kebijakan.

Model kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda agar sektor pendidikan, khususnya dari jalur pendidikan nonformal dapat dinilai kemanfaatannya bagi kemajuan daerah dapat dilihat dari Gambar 5.



Gambar 5.
Enam Langkah Kebijakan Penguatan Pendidikan Nonformal
Sumber: Hasil Analisis (2019)

Memperbarui komitmen pengambil kebijakan menjadi langkah pertama yang sangat strategis bagi pengembangan dan penguatan SDM, khususnya dari jalur pendidikan nonformal.

Adanya komitmen kuat dari pimpinan mengindikasikan pemahaman terhadap betapa strategisnya investasi pendidikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Melalui komitmen pimpinan juga nanti akan lahir berbagai kebijakan teknis turunan yang akan menjadi acuan bagi seluruh OPD untuk memberikan dukungan penuh yang mendorong kebijakan penguatan pendidikan dari jalur nonformal.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pembangunan database terintegrasi yang mudah diakses dan berisi indikator yang harus dicapai oleh daerah dari hasil investasi pendidikan terhadap perekonomian daerah. Perlu adanya *leading sector* yang mengelola database ini, dan suplai informasi serta datanya didapat dari seluruh OPD yang memiliki keterkaitan dengan sektor pendidikan, khususnya dari jalur informal. Database berbasis IT menjadi penting dipikirkan oleh daerah, sebab pemenuhan kebutuhannya akan berimplikasi pada anggaran daerah. Sehingga apabila daerah harus berhemat dalam penggunaan anggaran, sehingga bisa diantisipasi alternatif pemenuhan kebutuhannya.

Salah satu langkah yang mudah dalam tataran teori namun paling sulit dilakukan adalah sinergitas antar instansi (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pendidikan, khususnya memonitor jalur pendidikan nonformal agar dapat terpantau kemanfaatannya. Tugas ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak OPD namun saat ini masih bersifat parsial. Sehingga menjadi penting bekerja dalam model pemerintah sebagai satu kesatuan (*whole of government*), sehingga masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya akan dengan mudah mengakses segala informasi dan data terkait dengan pendidikan terkhusus dari jalur pendidikan nonformal.

Daerah selain menyiapkan berbagai kebijakan dan sarana prasarana pendukung, juga perlu menetapkan target-target konkrit agar kemanfaatan adanya sektor pendidikan dari jalur nonformal benar-benar terukur. Daerah lain sudah melakukan dan terus berupaya mencari alternatif variasi program dari pendidikan nonformal dari yang sudah ada, termasuk melakukan berbagai kerjasama dengan instansi/ lembaga pelatihan lain yang terkait dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga Kota Samarinda seharusnya dapat juga membuat target-target riil yang dihasilkan dari diskusi antar OPD, agar peningkatan perekonomian bisa dicapai.

Kebijakan yang dibuat harus diimplementasikan secara serius dan disiplin. Pengelolannya tentu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah secara hukum. Untuk mengawal keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka perlu adanya tim ditingkat daerah yang dikelola secara profesional.

Langkah terakhir adalah dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap apa-apa yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kebijakan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan yang bisa dilihat dari kebijakan sektor pendidikan dari jalur nonformal setidaknya adalah turunnya angka pengangguran di Kota Samarinda, peningkatan tenaga kerja yang bekerja diberbagai sektor, peningkatan jumlah wirausaha, munculnya variasi dari lembaga kursus/ pelatihan yang notabene bagian dari pendidikan nonformal, meningkatnya kerjasama pelatihan dengan instansi lain bahkan jika memungkinkan dengan negara lain, meningkatnya pendapatan daerah dari sektor industri serta jasa, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil yang didapat dari temuan dan pembahasan maka dapat diambil beberapa hal sebagai kesimpulan dari hasil kajian ini. Kondisi pendidikan nonformal saat ini dilihat dari aspek kebijakan sudah dilakukan urusannya berdasarkan amanah peraturan perundangan yang memayunginya. Dari segi substansi pendidikan nonformal variasinya dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat. Namun demikian kedepan perlu diperbanyak variasinya, khususnya untuk program pelatihan dan kursus yang secara langsung bisa berdampak pada perekonomian daerah. Adanya tantangan regional dan global serta kebijakan nasional dalam

prioritas pengembangan sektor yang bisa mempercepat ekonomi nasional setidaknya bisa menjadi acuan daerah dalam membenahi kebijakan di sektor pendidikan, khususnya dari jalur nonformal.

Saat ini pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha di Kota Samarinda belum terlalu banyak jenisnya dibanding dengan yang ada di daerah lain. Pengetahuan dan keterampilan berbasis online system (*e-commerce*) belum digarap dengan baik oleh pemerintah daerah. Jenis pengetahuan dan keterampilan yang memang biasanya ada secara konvensional telah ada dan berjalan dengan baik. Hanya saja pertumbuhannya belum bisa diketahui secara pasti karenan ketiadaan database yang lengkap.

Pengetahuan dan keterampilan yang ada saat ini seperti: salon, bengkel, komputer, penguasaan bahasa, menyetir masih cukup mendominasi. Pelatihan atau kursus yang mendorong lahirnya wirausaha ataupun pengelola lembaga koperasi masih kurang dilakukan.

Ada enam tahapan sebagai strategi kebijakan agar pendidikan nonformal bisa tumbuh dan berkembang lebih baik, yaitu: 1) komitmen pengambil kebijakan; 2) membangun database berbasis IT; 3) peningkatan sinergitas antar pelaku kebijakan di tingkat daerah dan pusat; 4) menetapkan target kontribusi/ kemanfaatan bagi daerah; 5) penegakkan kebijakan dan mengawal keberhasilan; 6) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengukuran capaian keberhasilan. Respon positif daerah terhadap dinamika internal dan eksternal yang terjadi juga menjadi penting agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.

Rekomendasi

Dari hasil kajian ini dapat dilihat bahwa sektor pendidikan nonformal belum menjadi prioritas daerah untuk digarap. Namun demikian dengan melihat berbagai data dan fakta dilapangan, serta melihat pengelolaan sektor pendidikan didaerah lain, maka bisa dilihat bahwa sektor pendidikan meskipun dari jalur informal sangat strategis dan berpotensi terhadap perekonomian daerah. Oleh karenanya rekomendasi yang bisa disampaikan dari hasil kajian ini antara lain:

1. Pemerintah Kota Samarinda perlu meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan, khususnya di sektor pendidikan khususnya dari jalur nonformal;
2. Penguatan perlu dilakukan untuk mendapatkan database pendidikan jalur nonformal agar lebih terukur dan dapat diproyeksikan kemanfaatannya bagi daerah;
3. Pemerintah Kota Samarinda harus terus mendorong model sinergitas, kolaborasi, serta kerjasama dalam satu konsep *whole of government*, agar masing-masing sektor tidak lagi bekerja sendiri-sendiri dan menghasilkan output secara parsial;
4. Pengambilan kebijakan berbasis kajian perlu ditingkatkan agar kebijakan yang akan diambil memiliki argumentasi berdasarkan data, fakta, dan informasi yang valid;
5. Komitmen semua pihak dari pimpinan daerah hingga para pejabat disemua level harus terus ditingkatkan, karena tanpa adanya komitmen kuat maka kebijakan yang dibuat tidak akan terlaksana dengan baik ditataran operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Samarinda. (2019). “*Kota Samarinda Dalam Angka 2019*”. Samarinda: BPS Kota Samarinda
- Coombs, Philip H. & Ahmed, Manzoor. (1974). “*Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*”. A Research Report for the World Bank. Baltimore: The John Hopkins University Pers.

- Dariah, Atih Rohaeti. (2004). “*Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi*”. Jurnal Mimbar, Vol. XX, No. 2, April-Juni 2004: 121-133. ISSN 0215-8175, e-ISSN 2303-2499. Bandung: Unisba.
- Hidayat, M. Arif & Anwar, Ali & Hidayah, Noer. (2017). “*Pendidikan Non-Formal Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan*”. Jurnal Edudeena Vol. 1 No. 1 pp. 31-42, Februari 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI
- Keuchel, Susanne von. (2014). “*Arts Education Development Index (AEDI) – Ein international-vergleichender empirischer Forschungsansatz in der Kulturellen Bildung*”. Dapat dilihat di: <https://www.kubi-online.de/artikel/arts-education-development-index-aedi-international-vergleichender-empirischer>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.
- Kingdom of Cambodia. (n.d). “*Policy of Non-Formal Education*”. Royal Government of Cambodia.
- Krezios, Athanasios (Sakis) & Ambrozy, Miki. (2010). “*Here2stay: A Handbook On Non-Formal Learning and Its Social Recognition*”. Greece: Kids in Action Non-Governmental Organization.
- Miradj, Safri & Sumarno. (2014). “*Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Halmahera Barat*”. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 1, Maret 2014.
- Pandya, Rameshwari & Maniar, Avani. (2014). “*Non Formal Education: An Indian Context*”. India: International e-Publication.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Kota Samarinda. (2016). *Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda*. Berita Daerah Kota Samarinda. Samarinda: Sekretariat daerah Kota Samarinda
- Prasetyo, Iis. (2009). “*Membangun Karakter Wirausaha Melalui Pendidikan Berbasis Nilai Dalam Program Pendidikan Non-Formal*”. Jurnal PNFI, Vol. 1, No. 1. Agustus 2009: pp.1-12. ISSN 2085-8213. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Reza. (2017). Mendikbud: Pendidikan Nonformal Punya Peranan Penting. <https://www.liputan6.com/news/read/3093586/mendikbud-pendidikan-nonformal-punya-peranan-penting>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.
- Suryono, Yoyon & Tohani, Entoh. (2016). “*Inovasi Pendidikan Nonformal*”. Yogyakarta: Graha Cendekia.

- Widiansyah, Apriyanti. (2017). “*Peran Ekonomi Dalam Pendidikan dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi*”. Jurnal Cakrawala, Vol.XVII, No. 2. September 2017. P-ISSN 1411-8629, e-ISSN 2579-3314.
- Widodo, Joko. (2018). “*Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*”. Jakarta. Dapat dilihat di presidenri.go.id. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2019.
- Zhang, Wen. (2014). “*Non-formal Education for Rural Development in China: Comparative Study of Shunshine Program and Community Learning Center in Yunnan*”. Sweden: Stockholm University.